

Universitas Ngudi Waluyo
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi, Hukum dan
Humaniora Skripsi, Agustus 2025
Arlina Azzahra
114211005

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN KORBAN ANAK
ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur serta menelaah proses penyidikan dan pembuktian yang dilaksanakan oleh Polres Semarang. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak anak yang menuntut penanganan secara menyeluruh dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data dikumpulkan melalui studi literatur serta wawancara dengan penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Semarang.

Penelitian ini menyoroti perlunya penegakan hukum yang mampu mengintegrasikan asas kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sebagaimana diuraikan dalam teori hukum Gustav Radbruch. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama antar instansi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kebijakan hukum yang berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertanggungjawaban pidana mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang menerapkan prinsip *strict liability*. Dalam konteks hukum, persetujuan dari anak dianggap tidak sah karena anak belum memiliki kapasitas hukum untuk menyetujui hubungan seksual. Proses penyidikan dan pembuktian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis korban, disertai dengan dukungan berupa *visum et repertum* dan keterangan saksi. Namun, penerapan prinsip keadilan restoratif masih belum maksimal karena proses hukum lebih berorientasi pada pemberian hukuman ketimbang pemulihan kondisi korban.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Persetubuhan terhadap Anak; Polres Semarang.

Ngudi Waluyo University
Legal Studies Program, Faculty Of Economics, Law and
Humanities Thesis, August 2025
Arlina Azzahra
114211005

**CRIMINAL LIABILITY IN CHILD SEXUAL INTERCOURSE
OFFENSES
ABSTRACT**

This research investigates the accountability of individuals committing sexual acts against minors, as well as assesses how the Semarang Police handle the processes of investigation and evidence gathering in such cases. Offenses involving child sexual abuse are considered serious breaches of children's fundamental rights and necessitate a thorough and integrated approach within the criminal justice framework. The methodology combines normative and empirical legal analyses, drawing upon literature sources and interviews with officers from the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Semarang Police.

This study underlines the necessity for law enforcement efforts that integrate legal certainty, justice in substance, and social benefit, echoing Gustav Radbruch's legal philosophy. Enhancing inter-agency collaboration, upgrading the competencies of investigators, and initiating legal reforms that prioritize the child's best interests are crucial steps toward delivering justice and protection to young victims of sexual violence.

The study reveals that perpetrators are held criminally responsible under the provisions of Law No. 35 of 2014 in conjunction with Law No. 17 of 2016 on Child Protection, employing a strict liability doctrine. Under this legal approach, a child's consent is deemed invalid due to their legal incapacity to engage in sexual acts. The investigative process is sensitive to the psychological well-being of the child victim and is supported by forensic examinations and witness testimonies. Nevertheless, the adoption of restorative justice remains minimal, with law enforcement predominantly focusing on punitive measures rather than holistic victim support and recovery.

Keywords: Legal Responsibility; Sexual Offenses Against Children; Criminal Justice.